

3. Community Dialogue
The dialogue was held in three

- a. SMAN 1 Jetis Bantul
Day, date: Friday, March 5, 2010
Time : 08.00-10.00 WIB
Venue : Hall of SMA Negeri 1 Jetis Bantul
- b. SMKN 2, Depok, Sleman
Day, date: Wednesday, March 10, 2010
Time : 10.00 WIB - onward
Venue : Hall of SMKN 2, Depok, Sleman
- c. SMAN 1 Teladan Yogyakarta
Day, date: Saturday, March 13, 2010
Time : 08.00 WIB - onward
Venue : Hall of SMAN 1 Yogyakarta

2. Series of Lectures for High School Students
Time : 20.00-21.00 WIB

The lecture series for high school students was held in three areas. In Bantul district was held at SMAN 1 Jetis Bantul. In Sleman district was held in SMKN 2, Depok Sleman. In Yogyakarta city was held at SMAN 1 Yogyakarta.

Participants of this activity are students and teachers at their respective schools. Attended from 100 expected invitees. Topics of each area are the same that is "Why Students Must Resist against Unclean Justice"? Presenter and moderator are Eliza Faiz, S.H. (Judicial Commission) and Kelik Sugianto, S.H. (PUSHAM UII).

The following are schedule of series of lectures in high schools in 3 areas:

1 (satu) jam dengan 1 (satu) pemateri. Topik *talkshow* juga berbeda-beda tapi tetap dalam konteks utama yaitu mengkampanyekan kepada masyarakat tentang urgennya mendorong peradilan bersih di Indonesia; kegiatannya meliputi:

- a. Senin, 1 Maret 2010
Pembicara: Imran, S.H., M.H.
Tema : Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mendorong Peradilan Bersih
Waktu : 20.00-21.00 WIB
- b. Senin, 8 Maret 2010
Pembicara: M. Syafiqe, S.H.
Tema : Peranan Masyarakat dalam Menjaga Kehormatan Peradilan
Waktu : 20.00-21.00 WIB

- c. Senin, 15 Maret 2010
Pembicara: Eko Riyadi, S.H.
Tema : Sistemiknya Mafia Peradilan di Indonesia
Waktu : 20.00-21.00 WIB

2. Ceramah Serial Siswa Tingkat SMA di Tiga Wilayah



Ceramah serial siswa tingkat SMA ini kita selenggarakan di 3 (tiga) wilayah Yogyakarta. Di daerah Bantul diselenggarakan di SMAN 1 Jetis Bantul. Daerah Sleman diselenggarakan di SMKN 2, Depok Sleman. Daerah kota diselenggarakan di SMAN 1

Teladan Yogyakarta. Peserta dari kegiatan ini ialah para siswa dan sebagian guru di sekolah masing-masing. Tercatat peserta yang hadir lebih dari kuota 100 peserta. Topik ceramah serial ini sama berjudul *"Mengapa Siswa Harus Melawan Peradilan Tidak Bersih?"*. Pemateri dan moderatornya sama: Ellza Faiz, S.H. (Komisi Yudisial RI) dan Kelik Sugiarto (PUSHAM UII).

Berikut jadwal kegiatan ceramah serial siswa tingkat SMA di 3 (tiga) Yogyakarta, yaitu:

- a. SMAN 1 Jetis Bantul
 - Hari : Jum'at, 5 Maret 2010
 - Waktu : 08.00-10.00 WIB
 - Tempat: Auditorium SMA Negeri 1 Jetis Bantul
- b. SMKN 2, Depok, Sleman
 - Hari : Rabu, 10 Maret 2010

Waktu : 10.00 - Selesai
 Tempat: Auditorium SMKN 2, Depok, Sleman

- c. SMAN 1 Teladan Yogyakarta
 - Hari: Sabtu, 13 Maret 2010
 - Waktu: 08.00 - Selesai
 - Tempat: Auditorium SMAN 1 Teladan Yogyakarta

3. Temu Wicara Masyarakat di Tiga Wilayah

Kegiatan temu wicara masyarakat kita langsung di 3 (tiga) wilayah Yogyakarta, meliputi Umbulharjo Kota Yogyakarta, Depok Sleman dan Janten Kulonprogo. Topik yang disampaikan dalam temu wicara masyarakat berbeda-beda dalam di setiap wilayah, walaupun secara umum sama, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat mewujudkan peradilan yang bersih. Peserta rata-rata sejumlah 35 orang. Berikut jadwal temu wicara

4. One Day Seminar
 - Waktu: 11, 2010
 - Tempat: Auditorium SMAN 1 Teladan Yogyakarta
 - Waktu: 09.00-onward
 - Tempat: The Right to Clean Judiciary, Yogyakarta, Depok Sleman and Janten Kulonprogo
 - Speaker: M. Syarif, S.H
 - Topic: Upholding Clean Judiciary, Require Community Control
 - Time: 19.00-selesai
 - March 17, 2010
- c. Janten, Kulonprogo
 - Day, date: Tuesday, March 23, 2010
 - Time: 09.00-onward
 - Topic: The Right to Clean Judiciary, Yogyakarta
 - Speaker: M. Syarif, S.H
 - Day, date: Tuesday, March 23, 2010
 - Time: 09.00-onward
 - Topic: The Right to Clean Judiciary, Yogyakarta

- a. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
 - Day, date: Thursday, March 11, 2010
 - Time: 09.00-onward
 - Topic: Resisting Judicial Mafia, There is Judicial Commission
 - Speaker: Imran, S.H., M.H.
 - Day, date: Wednesday, Depok, Sleman
- b. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
 - Day, date: Thursday, March 11, 2010
 - Time: 09.00-onward
 - Topic: Resisting Judicial Mafia, There is Judicial Commission
 - Speaker: Imran, S.H., M.H.
 - Day, date: Wednesday, Depok, Sleman

Public service advertisement was played in *Twenty One (XXI)* theaters, the largest cinema in

6. Public Service Ads 2010 edition.

Kedaulatan Rakyat, March 19, local newspaper, i.e. of Umbulharjo published in

we put on the area by the banner that press. It is indicated students and the attention of public, are getting posters and banners Depok Sleman. The Umbulharjo and installed in areas of the banners

the student movement. While and the secretariat of NGOs and places such as schools, offices Posters placed in many public are made only two sheets. 100 sheets, while the banners Posters are printed as many as

5. Posters and Banners University).



Relations Coordinator for the Judicial Commission), Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Director of Center for Human Rights Studies UII) and Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (Director of the Anti-Corruption Study Center Gadjah Mada

in Indonesia. This event was held on Monday, March 15, 2010, at Edotel Hotel, Yogyakarta, while the theme of this seminar is "The Society *Constitutional Rights for Clean Judiciary*". Speakers invited include; Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M (Inter-Agency

masyarakat, meliputi:

a. Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Hari : Kamis, 11 Maret 2010

Waktu : 09.00-selesai

Tema : Melawan Mafia Peradilan, ada Komisi Yudisial

Pembicara: Imran, S.H., M.H.

b. Depok, Sleman

Hari: Rabu, 17 Maret 2010

Waktu : 19.00-selesai

Tema : Tegaknya Peradilan Bersih, butuh pengawasan masyarakat

Pembicara: M. Syaff'ie, S.H

c. Desa Janten, Kulonprogo

Hari : Selasa, 23 Maret 2010

Waktu : 09.00-selesai

Tema : Hak atas

peradilan

bersih, sudah

dijamin

konstitusi!

Pembicara: Imran, S.H., M.H.

4. Seminar Sehari

Tema besar dalam seminar ini ialah "Hak Konstitusional Masyarakat atas Peradilan Bersih". Tema ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan betapa peradilan bersih itu dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan pada hari Senin, 15 Maret 2010, bertempat di hotel Edotel, Selatan Mandala Krida, Yogyakarta. Sedangkan tema dalam seminar ini ialah "Hak Konstitusional Masyarakat atas Peradilan Bersih". Pembicara diundang sesuai kapasitasnya meliputi; Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M (Koordinator Bidang

Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial RI), Suparman Marzuki, S.H., M.SI (Direktur



Pusat Studi HAM UII) dan Zainal Arifin Mochtar, S.H. LL.M (Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM).

5. Pembuatan dan Pemasangan Poster dan Spanduk

Poster dicetak sebanyak 100 lembar, sedangkan spanduk dibuat hanya sebanyak dua buah. Poster dipasang di banyak tempat diantaranya adalah di sekolah-sekolah, kantor dan sekretariat LSM dan gerakan mahasiswa. Sedangkan spanduk dipasang di daerah Umbulharjo dan daerah Depok Sleman. Pembuatan poster dan spanduk ini mendapatkan

respon dari masyarakat, siswa dan pers. Terbukti kampanye peradilan bersih via spanduk yang kita pasang di daerah Umbulharjo diabadikan di Koran Kedaulatan Rakyat (KR) edisi, 19 Maret 2010.

6. Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat

Iklan layanan masyarakat diputarkan di bioskop *Twenty One (XXI)*, yaitu bioskop terbesar yang ada di Yogyakarta. Sebagaimana kontrak yang ada, iklan layanan masyarakat ini diputar di Studio 1 XXI semenjak tanggal 22 Maret-2 April 2010. Seperti dituturkan Manajer XXI Bp. Ilham, iklan ini diputar setiap harinya sebanyak 3-5 kali sesuai dengan film yang diputar setiap harinya. Studio 1 menurut Ilham berbeda dibanding studio-studio yang lainnya, studio 1 lebih banyak film yang diputar dan biasanya paling banyak penontonnya.

considered community dialogue about clean judiciary are very important, even 45% of respondents said that the Judiciary Commission should prioritize such dialogues. Only 10% of respondents said that this activity need not be a priority. This questionnaire is at least confirmed that the program associated with the grassroots community should be developed in the future, as one of dialogue participants in Depok-Sleman said: do not let such events of socialization of law and human rights are only consumed by the academics and the elite only. According to him, grassroots community in local areas requires more knowledge than those people who averagely well educated.

Yogyakarta. As agreed, this advertisement was playing in the Studio 1 XXI from 22 March to 2 April 2010. As told by the Manager of XXI theatres, Mr. Ilham, this advertisement was played 3-5 times per day along with films shown each day. According to Mr. Ilham, Studio 1 is different from other studios; this studio plays more movies and usually drew more audiences.

7. Distributing Questionnaires

Questionnaires were distributed in three areas, i.e. Umbulharjo, Depok-Sleman and Janten-Kulonprogo concurrently with community dialogue meetings with respondents as many as 54 people, 91% of respondents

rights and the economic social and cultural rights, after previously ratifying other international conventions. In recent democracy era, where human rights became one of important aspects of change, the opportunity to disseminate human rights values and concepts are in the best momentum. In other words social, cultural, legal and political situation nowadays is favourable for strategic measures to bring strategic groups toward dissemination of human rights.

Particularly on the faculty of law, human rights as teaching subject. school to higher level has made institutions ranging from secondary in other areas, educational institutions ranging from secondary school to higher level has made human rights law has become a

The progress of human rights deliberation in Indonesia is quite encouraging. The governments response and political will are improving, as reflected through: the training curriculum for civil servants which has included human rights as one of the subject, opportunity of partnership with universities and NGOs which concerning human rights, drastic changes in the police body, particularly in responding human rights issues, and the most recent ratification of civil and political



A. Background

The progress of human rights deliberation in Indonesia is quite

Human Rights Scientific Meeting for the Deans of the Faculty of Law in Indonesia

7. Penyebaran Kuisisioner

Kuisisioner disebar di 3 (tiga) wilayah yaitu Umbulharjo, Depok Sleman dan Desa Janten Kulonprogo dalam kegiatan temu wicara masyarakat dengan responden sebanyak 54 orang. Sebanyak 91% responden menganggap kegiatan temu wicara masyarakat tentang peradilan bersih sangat penting untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial RI, bahkan 45% responden mengatakan bahwa Komisi Yudisial RI harus memprioritaskan temu wicara masyarakat. Hanya 10% responden yang mengatakan bahwa kegiatan ini tidak perlu

menjadi prioritas. Kuisisioner ini setidaknya menegaskan bahwa program yang berhubungan dengan masyarakat akar rumput harus dikembangkan kedepan, sebagaimana salah seorang peserta temu wicara masyarakat di Depok Sleman mengatakan, jangan sampai acara-acara sosialisasi hukum dan HAM hanya dikonsumsi oleh pihak-pihak akademisi dan elit saja. Menurutnya, masyarakat kecil di daerah-daerah lebih membutuhkan pengetahuan ketimbang orang-orang elit yang rata-rata telah bersekolah.

Perjamuan Ilmiah tentang Hak Asasi Manusia bagi Dekan Fakultas Hukum Se-Indonesia



A. Latarbelakang

Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia cukup menggembirakan. Respon dan kemauan politik pemerintah juga

kian membaik, sebagaimana dapat dilihat melalui kurikulum training di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasukkan hak asasi manusia sebagai salah satu materi pelatihan, makin terbukanya hubungan kerjasama perguruan tinggi dan LSM yang konsen terhadap hak asasi manusia dengan pemerintah, makin kuatnya arus perubahan di lingkungan Kepolisian, terutama dalam merespon isu-isu hak asasi manusia, dan yang terbaru adalah telah diratifikasinya hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, setelah beberapa waktu sebelumnya meratifikasi konvensi-konvensi internasional lainnya. Di era demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini, dimana hak asasi manusia menjadi salah satu aspek penting perubahan, maka peluang untuk melakukan diseminasi agar pemahaman tentang nilai-nilai dan konsep-konsep hak asasi manusia oleh berbagai kalangan berada dalam

momentum yang tepat. Atau dengan kata lain, situasi sosial, budaya, hukum dan politik saat ini sangat kondusif untuk dilakukan berbagai langkah strategis terhadap kelompok-kelompok strategis untuk membawa mereka masuk ke dalam arena diseminasi hak asasi manusia.



Pada wilayah yang lain, lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Pertama hingga Perguruan Tinggi telah menjadikan hak asasi manusia sebagai materi yang diajarkan. Khususnya di fakultas hukum, hukum hak asasi manusia telah menjadi mata kuliah wajib (*compulsory*) di lebih dari 85% fakultas hukum se Indonesia. Fakultas hukum menjadi wahana untuk mendiseminasikan hak asasi

school. This event invites international and national speakers include Dr. Hanne Sophie Graeve (*Hague International Criminal Court Judge*), Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (*Director of PUSHAM UII Yogyakarta*), Sri Palupi (*Director of Institute for Ecosoc Rights Jakarta*), Fadillah Agus, S.H., M.H.



development of human rights subject at the law school. The Faculty becomes important media for disseminating human rights because most of the principles of human rights are directly related to the law, in the contexts of legal basis for the preparation of government human rights subject at the law

compulsory subject in more than 85% of law schools across Indonesia. The Faculty becomes important media for disseminating human rights because most of the principles of human rights are directly related to the law, in the contexts of legal basis for the preparation of government human rights subject at the law school. This activity is to increase the awareness of policy-makers at the law faculties that human rights are very important subject to be delivered to students. Therefore, the faculties' officials are expected to provide sufficient impetus for the existence and

B. Description

Amzilian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D (Dean of Faculty of Law Srwijaya University of Indonesia), Prof. Mughoddas, S.H., M.Hum (Chairman of National Judicial Commission) and Idrhal Kasim, S.H. (Chairman of National Human Rights Commission). The event was held on June 16 to 17, 2010 in Jogjakarta Plaza Hotel Yogyakarta. This training was executed in collaboration between the Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia and the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway.



(Humanitarian Law expert), Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M (Former Chairman of the National Human Rights Commission), Prof. Soetandyo Wignyosubroto (Professor Emeritus Airlangga University), Dr. Yayan Sopyan M.A., (Director of Centre for Human Rights and Law Studies Syarif Hidayatullah State Islamic

University Jakarta), Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Constitutional Law expert from

manusia karena sebagian besar prinsip hak asasi manusia berhubungan langsung dengan hukum, baik dalam konteks penyusunan landasan hukum bagi kebijakan pemerintah, kebijakan legislasi dan juga dalam praktik penegakan hukum. Untuk semakin memantapkan kondisi tersebut, PUSHAM UII melakukan perjamuan ilmiah hak asasi manusia bagi dekan fakultas hukum se Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pemangku kebijakan di tingkat fakultas hukum bahwa hak asasi manusia adalah materi yang sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Oleh karena



itu, diharapkan struktur kampus memberikan dorongan yang memadai bagi eksistensi dan

pengembangan materi hak asasi manusia di tingkat fakultas hukum.

B. Kegiatan

Kegiatan ini berupa perjamuan ilmiah, yaitu mengajak peserta yang hadir untuk diskusi secara aktif dan ilmiah tentang hak asasi manusia dan bagaimana mengembangkan materi hak asasi manusia di tingkat fakultas hukum. Acara perjamuan ilmiah ini mengundang narasumber internasional maupun nasional antara lain Dr. Hanne Sophie Graeve (*Hakim Mahkamah Pidana Internasional Den Haag*), Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (*Direktur PUSHAM UII Yogyakarta*), Sri Palupi (*Direktur Institute for Ecosoc Rights Jakarta*), Fadillah Agus, S.H., M.H. (*Pakar Hukum Humaniter*), Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M (Mantan Ketua KOMNAS HAM), Prof. Soetandyo Wignyosubroto (*Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Surabaya*), Dr. Yayan

Sopyan M.A., (Direktur Pusat Kajian Hukum dan HAM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), M. Busyo Muqoddas, S.H., M.Hum (Ketua Komisi Yudisial RI) dan Ildhal Kasim, S.H. (Ketua

KOMNAS HAM RI). Kegiatan ini dilaksanakan pada 16-17 Juni 2010 di Hotel Jogjakarta Plaza Yogyakarta. Training ini terlaksana atas kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UIN) Yogyakarta dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia.

Penulisan Buku tentang Hak Kelompok Rentan

A. Latarbelakang

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia pada tahun 2008 telah bekerjasama dengan Norwegian Center of Human Rights (NCHR), Universitas Oslo Norwegia dalam menyusun dan mempublikasi buku berjudul Hukum Hak Asasi Manusia. Buku ini didesain untuk digunakan oleh para dosen dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Pada

prakteknya, buku tersebut menjadi bacaan wajib mahasiswa hukum Strata 1 (S-1) dan Strata Dua (S-2) bahkan Strata Tiga (S-3). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Depkumham, LSM, Polisi dan TNI



indicates that, on one hand the public interests in human rights in Indonesia is quite significant, but on the other, the availability of qualified books in Indonesian language is very limited. Therefore, the gap between the strong interest in reading, or curiosity about human rights with the scarcity of reading materials should be addressed, because in that way people can have extensive source of reading, and in turn will encourage rapid development of



undergraduate and postgraduate students and even for doctoral program. Regional Office of Department of Justice and Human Rights, NGOs, police and the Army has made it as main textbook. This phenomenon

Book on the Rights of Vulnerable Groups

A. Background

Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia in 2008 has been collaborating with the Norwegian Centre of Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway in compiling and publishing a book entitled Human Rights Law. This book was designed for lecturers and students at the various faculties of law in Indonesia who took Human Rights Law subject. In practice, the book became compulsory reading for law

The preparation process was done through two stages, namely workshop and writing. Workshop is where experts and other stakeholders are invited to formulate syllabus and determining proficient authors. The writing

B. Description

with their specific needs. special treatment in accordance apparatus, enable them to give more attention, as for state vulnerable people who require there are many increasingly aware that

accepted to this book, people are stakeholders. Through existed by other even considered not often overlooked and their basic rights are

become victims for long time and needed. This is because they vulnerable groups is extremely human rights activists for

Further concern from scholars, categorized as vulnerable groups. empathy from PUSHAM UII for those and it is as a form of academic of this particular issue is quite high chosen because of academic needs groups. The theme is deliberately specifically elaborates vulnerable one additional book that conditions, PUSHAM UII prepared certain issues. From such provides detailed explanation on are too normative and did not form of textbook, whose substance complained because it is still in a



human rights in Indonesia. However, readers and users of the Human Rights Law textbook is often

pun telah menjadikan buku itu sebagai buku bacaan utama.

Fenomena itu menunjukkan bahwa,



di satu sisi minat masyarakat terhadap hak asasi manusia di Indonesia cukup tinggi, tetapi disisi lain ketersediaan buku bacaan bermutu dalam bahasa Indonesia sangat terbatas. Oleh karena itu kesenjangan antara kuatnya minat baca, atau keingintahuan tentang hak asasi manusia dengan kelangkaan sumber bacaan harus segera diatasi, dan dengan cara demikian masyarakat bisa memiliki sumber bacaan yang luas, di samping akan mendorong lebih cepat perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.

Para pembaca dan pengguna buku Hukum Hak Asasi Manusia seringkali mengeluhkan karena buku tersebut

masih bersifat 'buku ajar', sehingga substansinya terlalu normatif dan belum memberikan penjelasan detail mengenai isu-isu tertentu. Berangkat dari kondisi tersebut, PUSHAM UII menyusun satu buku tambahan dengan tema kelompok rentan. Tema ini sengaja diambil selain kebutuhan akademik akan isu ini cukup besar juga sebagai bentuk empati akademik PUSHAM UII kepada mereka yang termasuk kategori kelompok rentan.

Perhatian khusus dari kalangan akademisi, pegiat dan aktifis hak asasi manusia bagi kelompok rentan sangat diperlukan. Hal ini karena telah lama mereka menjadi orang yang menjadi korban dan hak-hak dasarnya seringkali dilupakan bahkan dianggap tidak ada oleh stakeholder yang lain. Melalui penulisan buku ini, diharapkan masyarakat akan semakin sadar bahwa di sekeliling mereka banyak orang-orang yang rentan yang membutuhkan perhatian lebih dan juga kepada mereka para

pemangku negara agar memberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

B. Kegiatan

Proses penyusunan buku ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap workshop dan tahap penulisan. Tahap workshop adalah tahap dimana para pakar dan *stakeholder* diundang untuk menghadiri workshop dalam rangka merumuskan silabi sekaligus menentukan para penulisnya.



Sedangkan tahap penulisan adalah tahap dimana para penulis sebagaimana telah disepakati pada saat workshop akan menulis naskah sesuai dengan silabi yang ada. Adapun setelah workshop selesai, disepakati beberapa tema sekaligus

penulisnya, yaitu: Perdebatan Konseptual (Ifdhal Kasim), Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (Rudi M. Rizki), Prinsip Non-Diskriminasi (*inklusivisme-equality*), Mekanisme Perlindungan (Enny Soeprapto). Isu-isu tematiknya antara lain Hak Anak (Mohammad Farid), Hak Perempuan (Sulistiyowati Irianto), Hak Penyandang Disabilitas (Setia Adi Purwanta), Hak Pekerja Migran (Hesti Armiwulan), Hak Masyarakat Adat (Emil Ola Kleden), Hak Kelompok Minoritas (Joseph Adi Prasetyo), Hak Orang dengan HIV/AIDS dan LGBT (Budi Wahyuni).

Kegiatan workshop dilaksanakan pada 21-22 Juni 2010 bertempat di Hotel Jogjakarta Plaza. Program penulisan buku ini terlaksana atas kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia.

Women (Sulistiyowati Irianto), Rights of Persons with Disabilities (Setia Adi Purwanta), Rights of Migrant Workers (Hesti Armiwulan), Indigenous Peoples Rights (Emil Ola Kleden), Rights of Minority Group (Joseph Adi Prasetyo), Rights of People with HIV/AIDS and LGBT (Budi Wahyuni). The workshop was held on June 21 to 22, 2010 at Jogjakarta Plaza Hotel. This program is done in collaboration between the Centre for Human Rights Studies Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) and the Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway.



process is where authors write a text under agreed syllabus. The workshop was agreeing upon

several themes and authors, namely: *Conceptual Debate* (Ifdhal Kasim), *Human Rights Principles* (Rudi M. Rizki), *Non-Discrimination Principles* (*inclusive-equality*), *Protection Mechanism* (Enny Soeprapto), while the thematic issues are the Rights of the Child (Mohammad Farid), Rights of